****

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN REMBANG

**SATPOL PP**

**TAHUN 2021-2026**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat , hidayah dan Ridhonya sehingga penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang dapat tersusun dengan lancar.

Rencana Stratgis Satpol PP Tahun 2021-2026 adalah sebagai dokumen Perencanaan yang di evaluasi setiap 5 (lima) Tahun yang memuat tujuan , sasaran, program dan kegiatan dengan mengacu RPJMD 2021-2026.

Perencanaan Strategis di maksud mempunyai Kewajiban menyusun rencana Strategis perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing masing dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah

Rencana Strategis kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang Tahun 2021-2016 merupakan dokumen perencanaan yang akan di evaluasi pada 5 (lima) Tahun sekali.

Penyusunan Rencana Strategis ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan demi sempurnanya dan kejelasan dokumen pada akhirnya akan membawa manfaat bagi semuanya.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Rembang, 2021 |
|  | KEPALA SATPOL PP KAB. REMBANG  Drs. WALUYO, MM  Pembina Utama Muda  NIP 19630401 199102 1 001 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DAFTAR ISI** | | | |
|  | | | |
| **KATA PENGANTAR** | | | i |
| **DAFTAR ISI** | | | ii |
|  |  |  |  |
| **BAB I** | **:** | **PENDAHULUAN** | **1** |
|  |  | 1. Latar Belakang | 1 |
|  |  | 1. Landasan Hukum Penyusunan Renstra | 5 |
|  |  | 1. Maksud dan Tujuan | 7 |
|  |  | 1. Sistematika Penyusunan Renstra | 9 |
| **BAB II** | **:** | **GAMBARAN UMUM** | **12** |
|  |  | 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satpol PP | 12 |
|  |  | 1. Sumber Daya Satpol PP | 21 |
|  |  | 1. Kinerja Pelayanan Satpol PP | 31 |
|  |  | 1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP | 31 |
| **BAB III** | **:** | **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI** | **31** |
|  |  | 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol PP | 31 |
|  |  | 1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 33 |
|  |  |
|  |  | 1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 36 |
|  |  | 1. Penentuan Isu-isu Strategis | 37 |
| **BAB IV** | **:** | **TUJUAN DAN SASARAN** | **39** |
|  |  | 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah | 39 |
| **BAB V** | **:** | **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN** | **42** |
| **BAB Vl** | **:** | **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN** | **47** |
| **BAB VII** | **:** | **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN** | **57** |
| **BAB VIII** | **:** | **PENUTUP** | **60** |
|  |  |  |  |
| **LAMPIRAN** | | | |

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No 17 Tahun 2007 Tentang RPJP Tahun 2005-2025 juga berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Tahun 2021-2026, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)Tahun 2021-2016 Dengan Mengacu pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026. Renstra PD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026, akan memuat isu strategis, kondisi pencapaian hingga akhir tahun 2026, pemasalahan dan tantangan berkaitan dengan sesuaikan tupoksi Satpol PP, Linmas dan Damkar, dan untuk menentukan strategi pengembangan dan peningkatan adalah dengan mengetahui isu strateginya. Identifikasi isu strategis  memiliki peranan yang sangat vital, terutama untuk pengambilan keputusan atau perumusan suatu kebijakan yang akan dilaksanakan oleh organisasi.

Dalam penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang diperlukan perbaikan-perbaikan atau Evaluasi dengan melihat kelemahan-kelemahan yang di laksanakan pada kegiatan 2021 dan mencari inovasi terhadap peluang-peluang yang berdampak bagi keberhasilan Program.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 tahun 2016 tentang Tupoksi Satpol PP pasal 13, Seksi Damkar pada Satpol PP Kab. Rembang memiliki tupoksi yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi sarana prasarana logistik yang berkaitan dengan pemadam kebakaran, memeriksa, memelihara, menyiapkan peralatan serta menyiagakan tugas pemadam kebakaran, melaksanakan pembinaan, pelatihan dan mengarahkan personil dalam menangani pemadam kebakaran.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renja-SKPD merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Renja-PD merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan.



Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017

Berdasarkan tahapan tersebut, maka penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 diharapkan dapat memenuhi fungsi sebagai berikut:

1. Renstra Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun merupakan media untuk mengimplementasikan program prioritas Kepala Daerah terpilih di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran yang telah dijabarkan dalam RPJMD sekaligus sebagai instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah di ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran selama 5 (lima) tahun;
2. Renstra Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan pedoman pembangunan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran selama 5 (lima) tahun;
3. Renstra Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman dan acuan penjabaran dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD);
4. Renstra Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.

Peran utama Satpol PP dalam membantu program- program Kepala Daerah untuk menciptakan dan mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat melalui penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah. Program kegiatan yang dilaksanakan diantaranya hasta tertib yaitu tertib PKL, tertib tempat usaha, tertib reklame, tertib IMB, tertib pajak, tertib pertanahan dan tertib tri tuna (tuna karya, tuna susila, tuna wisma), pengamanan giat-giat pemerintah dan pengamanan aset milik pemerintah. Selain itu juga pengamanan dalam event tertentu seperti pengamanan Pemilukada, Pileg dan Pilpres. Untuk melaksanakan tugas tersebut perlu adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait diantaranya tokoh masyarakat, Tokoh Ulama, TNI, POLRI, LSM, media pers dan lain sebagainya.

Renstra Satpol PP pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang  berlaku secara internal bagi segenap jajaran pimpinan dan staf Satpol PP sendiri. Substansinya merupakan bentuk kongkrit terhadap apa yang harus dilakukan  oleh Satpol PP agar proses perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah kepada pencapaian visi dan misi daerah**.** Secara substansi Renstra Satpol PP diposisikan sebagai rujukan dalam menjaga konsistensi tentang proses perencanaan pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang. Hal ini dilakukan agar terdapat sinkronisasi dan harmonisasi didalam menerjemahkan RPJMD ke dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab unit kerja. Pada sisi lain, Renstra Satpol PP merupakan terjemahan RPJMD seperti halnya Renstra PD lain.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Rembang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

**Gambar 1.2**

**Keterkaitan Dokumen Perencanaan**

|  |
| --- |
|  |
|  | image001 |

Selanjutnya Renstra Satpol PP tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Satpol PP dalam kurun waktu 5 tahun.

* 1. **Landasan Hukum Penyusunan Renstra**

Landasan hukum penyusunan RENSTRA Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
25. ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang.
27. **Maksud dan Tujuan**

**Maksud**

penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 adalah :

1. Sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Rembang terpilih yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan Satpol PP selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan;
2. Menyediakan satu acuan resmi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan;
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kinerja tahunan;
4. Memudahkan seluruh jajaran Satpol PP Kabupaten Rembang dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan tahunan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya Satpol PP secara efesien, efektif dan berkelanjutan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 adalah :

1. Untuk memberikan pedoman dan arah kebijakan daerah dalam 5 tahun ke depan yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
2. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien, sesuai perencanaan dan penganggaran;
3. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Satpol PP dengan membandingkan target dan hasil yang dicapai;
4. Menerjemahkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang terpilih ke dalam tujuan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang RPJMD periode berkenaan;
5. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan ketentraman dan ketertiban yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh Satpol PP sebagai penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang terpilih selama 5 (lima) tahun;
6. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksana program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
7. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.
   1. **Sistematika Penyusunan Renstra**

Dokumen Renstra Satpol PP Kabupaten Rembang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar belakang
2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penyusunan Renstra

**BAB ll GAMBARAN UMUM SATPOL PP KABUPATEN REMBANG**

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satpol PP
2. Sumber Daya Satpol PP
3. Kinerja Pelayanan Satpol PP
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATPOL PP KABUPATEN REMBANG** Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3. Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB lV TUJUAN DAN SASARAN**

1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

**BAB V STATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Satpol PP Kabupaten Rembang merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat jenis-jenis program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Satpol PP Kabupaten Rembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tahun 2021-2026

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SATPOL PP KABUPATEN REMBANG**

Memuat indikator kinerja yang mengacu pada urusan Satpol PP Kabupaten Rembang

**BAB VlII PENUTUP**

Memuat tentang penegasan fungsi Renstra yaitu berlaku sebagai acuan dan pedoman bagi setiap jajaran Satpol PP Kabupaten Rembang serta sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan (*stake holders*).

**LAMPIRAN**

**BAB ll**

**GAMBARAN UMUM**

1. **Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satpol PP**
2. **Tugas Pokok dan Fungsi**

Satpol PP berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dan Perbup Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satpol PP Kabupaten Rembang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Satpol PP menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
3. pelaksanaan kebijakan dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2.1.2 Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Sekretariat Satpol PP menyelenggarakan fungsi:

1. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
2. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
4. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
5. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
6. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
   * 1. **Bidang Pemadam Kebakaran**

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi Pemadam Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

1. pengelolaandanpenyelenggaraankegiatanbidangPerlindungan MasyarakatdanPemadamKebakaranuntukmendukungkelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
2. pengkoordinasiandanpengendalianpelaksanaankegiatanbidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
3. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
   * 1. **Bidang Ketenteraman Masyarakat,ketertiban umum dan Penegakan Peraturan Daerah**

Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah yang terdiri dari ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan penegakan peraturan daerah..

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah;
2. pengelolaandanpenyelenggaraankegiatanbidangKetertibanUmum, Ketenteraman Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
3. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah;
4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
   * 1. **Struktur Organisasi**

Dalam menyelenggarakan tugas fungsi tersebut, Satpol PP Kabupaten Rembang mempunyai kelembagaan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

* 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  2. Sekretariat terdiri dari
     + 1. Sub Bagian perencanaan dan Keuangan;
       2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Bidang PemadamKebakaran, terdiri dari :
     + 1. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyrakat;
       2. Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan sarana prasarana;
  4. Bidang Ketenteraman Masyarakat ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah, terdiri dari :
     + 1. Seksi Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
       2. Seksi Penindakan ;
       3. Seksi Penyelidikan dan penyidikan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut bagan organisasi Satpol PP Kabupaten Rembang:

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

Jabatan Fungsional

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian perencanaan dan Keuangan

Bidang Ketenteraman Masyarakat,ketertiban umum dan Penegakan

Peraturan Daerah

Bidang Pemadam Kebakaran

Seksi penindakanan

Seksi Pencegahan pemberdayan masyarakat

Seksi ketentraman ketertiban umum dan pelindungan masyrakat

Seksi penyelidikan dan penyidikan

Seksi Pemadam penelamatan sarana prasarana Kebakaran

**Bagan Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Rembang**

*Sumber: Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satpol PP Kabupaten Rembang*

* 1. **Sumber Daya Satpol PP**

**2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Rembang. Sumber daya manusia yang ada di Satpol PP berjumlah orang terdiri dari PNS sejumlah 81 orang, Tenaga Kontrak 7 orang, Tenaga harian lepas ( THL ) sebanyak 17 orang. Berdasarkan gender ( jenis kelamin ), dari jumlah PNS sebanyak 81 orang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jumlah pejabat struktural 10 orang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 1 perempuan, dan 17 orangpejabat fungsional. Penempatan pegawai dinas adalah berdasarkan kompetensi pada basis pendidikan, diklat struktural, diklat fungsional, diklat teknis maupun pengalaman.

Adapun komposisi pegawai berdasakan basis tingkat pendidikan dan golongan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Komposisi PNS Satpol PP Kabupaten Rembang**

**MenurutPendidikan Formal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **TingkatPendidikan** | **Jumlah** |
| 1 | Pasca Sarjana (S.2) | 2 |
| 2 | Sarjana (S.1) | 15 |
| 3 | Diploma (D.III) | 1 |
| 4 | SLTA | 50 |
| 5 | SLTP | 13 |
| 6 | SD | 0 |
| **Jumlah** | | **81** |

*Sumber : Satpol PP Kabupaten Rembang, 2019*

**Tabel 2.2**

**Komposisi Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan**

**Satpol PP Kabupaten Rembang**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Golongan** | **Jumlah** |
| 1 | IV | 4 |
| 2 | III | 28 |
| 3 | II | 42 |
| 4 | I | 9 |
| **Total** | | **81** |

*Sumber : Satpol PPKabupaten Rembang, 2019*

**Grafik 2.1**

**Target dan Realisasi Rasio Jumlah Polisi pamong praja per 10.000 penduduk**

Sumber : Data Satpol PP, 2020

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk selama 3 tahun terakhir (dari tahun 2018-2020) mengalami peningkatan, namun belum sebanding dengan target renstranya. Dengan keberadaan personil yang masih dibawah target renstra, maka perlu upaya Pemerintah Daerah untuk menambah personil polisi pamong praja melallui pengadaan pegawai.

**Sasaran 2 : Cakupan patroli petugas satpol PP per hari**

Cakupan patroli petugas satpol PP adalah jumlah patroli petugas satpol pp dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam waktu 1 hari (24 jam). Patroli petugas satpol PP Kabupaten Rembang melakukan patroli 2 kali dalam sehari. Hal ini sesuai target yang ditetapkan di renstra, sehingga capaian kinerja nya 100% (**Sangat Tinggi**).

**Grafik 2.3**

**Target dan Realisasi Cakupan patroli petugas satpol PP per hari**

Sumber : Data Satpol PP, 2020

Cakupan patroli petugas satpol PP per hari selama 3 tahun terakhir (dari tahun 2018-2020 ) stagnan, dan sesuai dengan target renstranya. Pelaksanaan patroli satpol PP di tahun 2020, belum merata di setiap kecataman karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada. Dengan keberadaan personil yang masih proporsional dibanding dengan wilayah patroli, maka perlu upaya Pemerintah Daerah untuk menambah personil polisi pamong praja dan menghimbau kepada masyrakat ikut terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan tempat tinggalnya sehingga dapat tercipta lingkungan yang aman, tentram dan damai.

**Sasaran 3 : Cakupan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran**

Kebakaran dan bencana alam yang dapat terjadi setiap saat dapat menimbulkan terganggunya kelancaran produktivitas, kerusakan sarana dan prasarana, lingkungan tempat kerja serta dampak lainnya yang mungkin terjadi pada petugas berupa cidera, cacat fisik bahkan meninggal dunia. Semua ini baik secara langsung maupun tidak mengakibatkan banyak kerugian. Oleh karena penanggulangan terhadap bahaya kebakaran menjadi penting. Cakupan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran sesuai dengan luas wilayah Kabupaten Rembang yaitu 1.014,08 km2 sehinggan capaiannya 100% (**Sangat Tinggi**) seperti yang tersaji pada grafik berikut. Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya untuk memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran secara cepat.

**Grafik 2.4**

**Target dan Realisasi Cakupan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran**

Sumber : Data Satpol PP, 2020

Dalam pelaksanaan ketiga sasaran tersebut, terdapat program pendukung dalam pencapaian target sebagai tolok ukur kinerja Satpol PP Kabupaten Rembang, tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.4**

**Program Pendukung Kinerja Satpol PP Kab. Rembang**

| **No.** | **Program** | **OPD Pengampu** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Satuan Polisi  Pamong Praja |
| 2. | Program Penegakan Peraturan Daerah |
| 3. | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) |
| 4. | Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan |
| 5. | Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran |

**FAKTOR PENGHAMBAT**

**Tabel 2.5**

**Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Belum Tercapainya Kinerja Indikator Rasio Jumlah Polisi pamong praja per 10.00 penduduk**

| **No.** | **Faktor Penghambat** | **Strategi Pemecahan Masalah** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah personil Polisi Pamong Praja belum sesuai kebutuhan | Melakukan analisa jabatan dan analisa beban kerja sesuai kebutuhan agar tugas dan tanggungjawab dalam penegakan hukum menuju penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana dengan dengan baik |
| 2. | Aparatur Satpol PP dan petugas perlindungan masyarakat yang kurang terlatih sehingga tidak dapat mendukung tegaknya Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah | Memberikan pelatihan bagi aparatur satpol pp dan petugas perlindungan masyarakat sehingga dapat mendukung tegaknya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sehingga tingkat kepuasan masyarakat dapat dicapai |
| 3. | Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan yang kurang | Usulan Penambahan sarana dan prasarana |

**FAKTOR PENDORONG**

**Faktor Pendorong Tercapainya Kinerja Indikator Cakupan patroli petugas satpol PP per hari dan Cakupan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran**

1. Melaksanakan patroli secara rutin setiap hari sehingga pelanggaran pelanggaran ketertiban, ketentraman dan kenyamanan yang berdampak kepada bertambahnya kerusakan lingkungan bisa diminimalisir;
2. Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah selalu ditegakan dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tuntutan keadaan dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat;
3. Meningkatnya Kualitas Layanan publik sebagai upaya pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Melaksanakan usaha pencegahan (pengawasan, pendataan, inspeksi, pengujian); dan penanggulangan kebakaran;
5. Meyelenggarakan penyuluhan secara berkesinambungan kepada masyarakat dalam penanggulangan terhadap bahaya kebakaran;
6. **Sarana dan Prasarana**

Sarana Prasarana yang dimaksud meliputi sarana prasarana yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Rembang sebagaiperalatankerja dinas dan sarana prasarana yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Rembang sebagai infrastruktur publik. Kondisi sarana prasarana sebagai alat kerja dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.7**

**Daftar Sarana dan Prasarana Satpol PP**

**Kabupaten Rembang**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Sarana dan Prasarana | Jumlah/luas | Sumber Dana |
|  | Tanah dan bangunan | - |  |
|  | Bangunan/gedung | 6 Unit |  |
|  | Perlengkapan kantor (diuraikan) | 295 Buah |  |
|  | ALAT ANGKUT |  |  |
|  | * MOBIL | 12 Unit |  |
|  | * SEPEDA MOTOR | 27 Unit |  |
|  | ALAT BENGKEL | 2 Buah |  |
|  | ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI | 60 Buah |  |
|  | ALAT PERSENJATAAN/ KEAMANAN | 1 Buah |  |
|  | JARINGAN | 8 Titik |  |
|  | Alat persenjataan keamanan | 3 | - |

*Sumber : Satpol PPKabupaten Rembang, 2019*

* 1. **Kinerja Pelayanan Satpol PP**

**Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat**

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas Penegakan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja telah berhasil mengamankan dan menyidangkan pelanggar Peraturan Daerah. Selama tahun 2018-2020 jumlah pelanggar terus mengalami penurunan dapat dijadikan indikatotr bahwa kesadaran masyarakat dalam mematuhi Perda semakin baik, sebagaimana terlihat pada grafik dan tabel berikut :

**Grafik 2.3.**

**Grafik Pelanggaran PERDA di Kabupaten Rembang**

**Dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020**

**Tabel 2.8**

**Data Pelanggaran Perda**

**Dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PERDA** | **JUMLAH BERKAS** | | | | | **Jml** |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Perda No 2 Tahun 2019 tenang ketertiban umum , | 23 | 35 | 27 | - | - | 85 |
| 2 | Perda Nomor 2 tahun 2019 tentang penatan dan pemberdayaan pedagang kaki lima | 27 | 39 | 25 | - | - | 91 |
| 3 | Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Perda nomor 4 Th. 2009 tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan | 12 | 19 | 9 | - | - | 40 |
| 4 | Perda nomor 15 Tahun 2011 tentang retribusi perjanjian tertentu | 19 | 25 | 15 | - | - | 59 |
| 5 | Perda No. 3 th 2008 penyelenggaran Usaha Kepariwisataan | 29 | 41 | 32 | - | - | 102 |
| 6. | Perda nomor 15 Th.2007 tentang bangunan gedung | 19 | 28 | 16 | - | - | 63 |
| 7. | Perda nomor 12 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Rembang nomor 9 Tahun 2003 tentang Pelanggran dan pengendalian peredaran Garam tidak beryodium | 5 | 7 | 0 | - | - | 12 |

Sesuai dengan tugas dan fungsi, organisasi dan struktur Satpol PP, Indikator Kinerja pelayanan adalah sebagai berikut:

* + 1. % penegakan perda;
    2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
    3. % penegakaan pelanggran produk hokum daerah
    4. % kecamatan yang kondusif
    5. % pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa /kelurahan ;
    6. % sarana dan Prasarana damkar persentase pelanggaran Perda yang ditangani;
    7. Persentase penyakit masyarakat yang tertangani;
    8. RasioLinmas per Jumlah 10.000 penduduk;
    9. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan;
    10. rasio poskamling per 10.000 penduduk;
    11. cakupan petugas Linmas di masing-masing Desa;
    12. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota;
    13. Tingkat waktu tanggap (response time rate);
    14. persentase pasar tradisional yang terpasang sistem pemadan kebakaran.

Pencapaian kinerja Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2016-2018 yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatannya dapat dilihat pada Tabel 2.9

**Tabel 2.9**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Kabupaten Rembang**

**Tahun 2016-2020**

| **No** | **Indikator** | **Satuan** | **Target Renstra Tahun** | | | |  | **Capaian Tahun** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Penegakan perda | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 87.66 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Cakupan pencegahan pengawasann terhadap ancaman bahaya | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Rasio Jumlah Polisi pamong praja per 10.00 penduduk | Angka | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 3.8 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 3.8 |
| 5 | Cakupan patroli petugas satpol PP per hari | % | 6 kali | 6 kali | 6 kali | 6 kali | 6 kqli | 6 kali | 6 kali | 6 kali | 6 kali | 6kali |
| 6 | Cakupan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 |
| 7 | Persentase kriminalitas yang tertangani | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Persentase pelanggaran Perda yang ditangani | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Persentase penyakit masyarakat yang tertangani | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | RasioLinmas per Jumlah 10.000 penduduk | Angka | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 9 | 89 | 89 | 87,91 | 88 |
| 11 | Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan | Angka | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Rasio poskamling per 10.000 penduduk | Angka | 55 | 65 | 75 | 85 | 85 | 55 | 21 | 78 | 89 | 89 |
| 13 | Cakupan petugas Linmas di masing-masing Desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | TTingkat waktu tanggap (response time rate) | Menit | <11 | <11 | <11 | <11 | 100 | <40 | <11-15 | <11-15 | <11-15 | <11-15 |
| 16 | Persentase pasar tradisional yang terpasang sistem | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Tabel 2.10**

**Pencapaian Kinerja Utama Satpol PP Kabupaten Rembang**

**Tahun 2016-2020**

| **No** | **Indikator** | **Satuan** | **Target Renstra Tahun** | | | |  | **Capaian Tahun** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019**  **I** | **2020** |
| 1 | Penegakan perda | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Cakupan pencegahan pengawasann terhadap ancaman bahaya | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Tabel 2.11**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP KabupatenRembang**

**Periode 2016-2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Anggaran** | | | | | **Realisasi** | | | | | **Rasio anatra realisasi** | | | | | **Rata-rata pertumbuhan** | |
|  | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | 2020 | 2021 |
| **Belanja** |  |  | 10.849.088.000 | 12.056.105.393 | 9.823.573.856 |  |  | 10.504.279.952 | 11.402.319.685 | 9.360.600.378 |  |  | 96,82 | 94,58 | 95,29 |  |  |
| **Belanja Operasi** |  |  | 9.919.590.000 | 10.861.107.493 | 9.810.973.856 |  |  | 9.603.672.192 | 10.243.402.530 | 9.349.500.378 |  |  | 96,82 | 94,31 | 95,30 |  |  |
| Belanja Pegawai |  |  | 8.335.686.000 | 8.987.183.393 | 8.898.414.704 |  |  | 8.080.193.141 | 8.635.063.640 | 8.477.672.065 |  |  | 96,93 | 96,08 | 95,27 |  |  |
| Belanja Barang jasa |  |  | 1.583.904.000 | 1.873.924.100 | 912.600.000 |  |  | 1.523.478.778 | 1.608.338.890 | 871.828.313 |  |  | 96,19 | 85,83 | 95,54 |  |  |
| **Belanja Modal** |  |  | 929.498.000 | 1.194.997.900 | 12.600.000 |  |  | 900.607.760 | 1.158.917.155 | 11.100.000 |  |  | 96,89 | 96,98 | 88,10 |  |  |
| Belanja Modal Peralatan Mesin |  |  | 254.511.000 | 792.497.900 | 12.600.000 |  |  | 247.501.760 | 768.935.355 | 11.100.000 |  |  | 97,25 | 97,03 | 88,10 |  |  |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan |  |  | 462.487.000 | 200.000.000 | 0 |  |  | 444.676.000 | 192.664.900 | 0 |  |  | 96,15, | 96,33 | 0 |  |  |
| Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan |  |  | 212.500.000 | 202.500.000 | 0 |  |  | 208.430.000 | 197.316.900 | 0 |  |  | 98,08 | 97,44 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Selain review terhadap kinerja layanan, dilakukan review terhadap pengelolaan pendanaan pelayanan Satpol PP Kabupaten Rembang untuk melengkapi evaluasi capaian kinerja yang telah disajikan sebelumnya. Analisis pengelolaan pendanaan dapat digunakan untuk menilai realisasi penyerapan anggaran pada Satpol PP Kabupaten Rembang periode 2016-201~~9~~,2020. Berdasarkan data realisasi fisik dan keuangan (RFK) pelaksanaan kegiatan APBD Satpol PP Kabupaten Rembang tahun anggaran 2016 hingga 2020, rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran pada periode tersebut mencapai 92,46.% (disesuaikan dengan data tabel diatas). Angka ini dipengaruhi oleh penanganan Perda maupun Perkada yang terlaksana dengan baik.

* 1. **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP**

Dalam memberikan pelayanan khususnya yang berkaitan dengan bidang kepegawaian, keuangan,ketentraman dan ketertiban satpol PP Kabupaten Rembang menghadapi sejumlah tantangan baik dalam skala daerah, regional maupun nasional, antara lain:

1. Penertiban bangunan Liar;
2. Penertiban Pedagang Kaki Lima;
3. Penertiban Gepeng, Orgil dan Anjal (PGOT)
4. Operasi Yustisi non Yustisial (Penegakan Perda);
5. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Umum;
6. Peningkatan Waktu Tanggap pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.
7. Penertiban Pajak dan Perijinan

Peluang pengembangan pelayanan Satpol PP yaitu antara lain:

1. Terbentuknya Tim Khusus untuk menangani Permasalahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum;
2. Terdapatnya Sumber Daya Aparatur yang telah mempunyai sertifikat PPNS;
3. Adanya Kemauan Masyarakat untuk dilakukan penyuluhan dan pembinaan tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
4. Adanya sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran untuk menjangkau wilayah Kabupaten Rembang.

**BAB lll**

**PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS SATPOL PP KABUPATEN REMBANG**

1. **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol PP**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah timbulnya permasalahan pembangunan daerah pada umumnya yang disebabkan oleh adanya faktor kekuatan yang belum dimanfaatkan secara optimal, adanya faktor kelemahan yang tidak diatasi, adanya peluang yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan ancaman yang tidak diantisipasi. Sehingga menyebabkan suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada bagian kelompok masyarakat.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis dapat disusun kedalam tabel matriks sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi**

| **Aspek Kajian** | **Capaian / Kondisi saat ini** | **Standar yang digunakan** | **Faktor Yang mempengaruhi** | | **Permasalahan Pelayanan OPD** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INTERNAL**  **(KEWENANGAN OPD)** | **EKSTERNAL (DI LUAR KEWENANGAN SKPK)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Cakupan patroli siaga  Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | Angka tinggi | SPM Permendagri | 1. Jumlah personil Satpol PP belum sesuai kebutuhan. 2. SDM belum sesuai kompetensi. 3. Satpol PP Kab. Rembang tipe C. | 1. Adanya gangguan tibumtranmas. 2. Masalah krusial konflik di masyarakat. 3. Adanya isu-isu yang meresahkan masyarakat. | Jumlah personil Satpol PP belum sesuai kebutuhan |
| Cakupan Penegakan Perda dan Perbup | Angka sedang | SPM Permendagri | 1. Terbatasnya PPNS Satpol PP. 2. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait. 3. Personil belum mengikuti diklat dasar Satpol PP sesuai Permendagri. | 1. Pelanggaran Perda dan Perbup yang dilakukan oleh masyarakat, badan hukum dan instansi. 2. Kurangnya sosialisasi Perda dan Perbup. 3. Pengaruh reformasi dan globalisasi yang berdampak pada pelanggaran. | Pelanggaran Perda dan Perbup yang dilakukan oleh masyarakat, badan hukum dan instansi. |
| Rasio Petugas Linmas | Angka tinggi | SPM Permendagri | 1. Belum maksimalnya petugas keamanan di lingkungan. 2. Kurang optimalnya peran Linmas. 3. Kurang maksimalnya fungsi poskamling. | 1. Adanya kerawanan gangguan keamanan lingkungan. 2. Masih adanya pelanggaran K3 di masyarakat. 3. Kurangnyakewaspadaan dini dan mitigasi. | Adanya kerawanan gangguan keamanan lingkungan |
| Kapasitas kualitas pelayanan pencegahan dan pemadaman kebakaran | Angka rendah | SPM Permendagri | 1. SDM pemadam kebakaran yang kurang sesuai kebutuhan. 2. Keterbatasan anggaran. | Rendahnya kepedulian masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran. | Meningkatkan kapasitas dan cakupan pelayanan pencegahan dan pemadaman kebakaran |

Permasalahan pelayanan Satpol PP Kabupaten Rembang berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Adanya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. Pelanggaran Perda dan Perbup yang dilakukan oleh masyarakat, badan hukum dan instansi;
3. Adanya kerawanan gangguan keamanan lingkungan;
4. Belum meratanya ketersediaan sarana prasarana pencegah dan penanganan kebakaran;
5. Rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan pencegahan dan pemadaman kebakaran.

Seiring berkembangnya kemajuan teknologi serta mulai nampak perubahan gaya hidup di masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran dan kesenjangan hidup yang tinggi maka hal tersebut dapat membuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih terbatas atau rendah. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi pada suatu pemerintah daerah adalah dengan mengkaji dan menganalisis gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kriminalitas yang terjadi dan dapat ditangani oleh pemerintah daerah. Semakin banyak terjadi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta tindakan krimininalitas disuatu daerah menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi diantara penduduknya.

Oleh karena sebagai wujud tata kelola aparatur penegak Perda untuk meningkatkan kinerja dan untuk menjaga stabilitas gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang wajib menyediakan pelayanan publik yang memadai dan berkualitas dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk menciptakan kondisi keamanan yang kondusif serta perlindungan masyarakat.

1. **Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih BAB 2**

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2016 merupakan gambaran pernyataan kondisi Kabupaten Rembang yang dicita-citakan pada tahun 2021. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran yang terukur yang menggambarkan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Misi selanjutnya dijabarkan lebih operasional dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi. Adapun Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu:

***“Rembang Gemilang 2026”***

Adapun maksud visi tersebut dijelaskan sebagaimana dibawah ini:

Visi yang menjadi visi Kabupaten Rembang periode tahun 2021-2026 adalah Mewujudkan “ReMBang Gemilang “ visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini selaras dengan visi RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 kabupaten Rembang yang sejahtera,Maju dan Madani.

Sedangkan Misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan mewujudkan visi.untuk meuwujudkan 5 Tahun yang akan datang ,tersebut di tempuh 4 misi pembangunan daerah sebagai berikut

1. Mengembangkan Profesionalisasi ,modernisasi ,Organisasi dan Tata Kerja Birokrasai

2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yng Semakin Berkualitas dan Terporoteksi dalam Jaminan Sosial

3. Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

4. Mengembangkan Kemandirian Desa Berbasis Potensi Lokal. Dengan demikian Satpol pp mendukung pada misi ke 1 (satu) yaitu Mengembangkan Profesionalisasi ,moderinisasi,Organisasi,dan tata kerja birokrasi sehingga mempunyai tujuan terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih seperti halnnya tupoksi dari satpol pp sendiri untuk menciptkan lingkungan yang bersih menciptkan ketenteraman untuk masyrakat.kondisi masyarakat yang ingin dicapai dalam RPJMD Tahun 2016-2021 ini adalah masyarakat sejahtera yang memiliki ciri-ciri sebagaimana dimaksud dalam dokumen RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025.

sehingga dapat mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, adapun Progran dan Kegiatan Satpol PP antara lain :

1. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
2. Perencanaan,Penganggran,dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah
3. Administras Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Pemeliharaan Barag Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
9. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
10. Penanganan gangguan Ketertiban mum dala satu daerah Kabupaten/kota
11. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/wali
12. Pembinaan Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS)
13. Program Pencegahan,Penanggulangan,Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
14. Pencegahan,Pengendalian,pemadaman,penyelamatan bahan berbahaya dan bercun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota
15. Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan pemadaman
16. Inspeksi peralatan proeksi kebakaran

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Satpol PP dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Rembang antara lain :

1. Adanya mekanisme sanksi yang tegas untuk pelanggaran Perda dan Perbup;
2. Jiwa Corsa dan semangat kinerja yang tinggi;
3. Mitigasi dan pencegahan kerawanan gangguan trantibum;
4. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan;
5. Kehadiran satuan tugas keamanan lingkungan dan satlinmas;
6. Partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Satpol PP dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Rembang antara lain :

1. Arus globalisasi dan pola hidup/budaya masyarakat, badan hukum dan pelaku usaha yang rentan pelanggaran Perda dan Perbup;
2. Kurangnya kualitas dan kuantitas PNS Satpol PP;
3. Maraknya isu-isu di masyarakat sehingga memicu kerawanan gangguan tibumtrammas;
4. Adanya tindak kriminalitas dan bencana dimasyarakat;
5. Belum optimalnya sistem keamanan lingkungan;
6. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran;
7. Kurangnya sarana dan prasaran pendukung dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran
8. **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sesuai dengan amanat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyusunan RTRW kabupaten mengacu pada : rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi; pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Rembang telah menetapkan Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan : perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten; upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten; keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten; daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; rencana pembangunan jangka panjang daerah; rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

Didalam RTRW, terdapat Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah yang didalamnya terdapat Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara meliputi: a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan; b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar KSN untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Kemanan; c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar KSN dengan kawasan budidaya terbangun; dan d. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Selain itu juga juga terdapat Kawasan Peruntukan Budidaya Lainnya, meliputi :

* + - 1. Kawasan peruntukan budidaya lainnya meliputi: a. kawasan pertahanan dan keamanan; dan b. kawasan bumi perkemahan;
      2. Perwujudan kawasan budidaya lainnya sebagaimana meliputi:

a. Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi: 1. penataan dan pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan; dan 2. penataan permukiman penduduk disekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang disesuaikan dengan standar kebutuhan.

b. Perwujudan kawasan bumi perkemahan meliputi: 1. penataan dan pengelolaan kawasan bumi perkemahan; dan 2. penataan permukiman sekitar kawasan yang disesuaikan dengan standar kebutuhan.

KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan bersamaan dengan Renstra Perangkat Daerah, sehingga hasil penapisan dari KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra SKPD serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dari hasil penapisan yang dilakukan terhadap program prioritas dalam dokumen RPJMD Perubahan Tahun 2016-2021 yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis, maka terpilih program prioritas yang memiliki pengaruh terhadap isu-isu strategis, sedangkan pada Urusan penunjang pemerintahan Perencanaan Pembangunan dinilai tidak mempunyai pengaruh/ dampak terhadap isu strategis sehingga tidak perlu untuk merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

1. **Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isustrategis berdasarkan tugas dan fungsi Satpol PP adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisi pasti akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang.

Faktor-faktor dari pelayanan Satpol PP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Satpol PP ditinjau dari : (1) gambaran pelayanan Satpol PP, (2) sasaran jangka menengah dari Renstra Satpol PP dan (3) implikasi RTRW bagi pelayanan Satpol PP.

Sehingga dapat ditentukan isu-isu strategis Satpol PP Kabupaten Rembang yaitu :

1. Belum tersedianya prosedur standar operasional pelayanan terhadap kamtibmas pada masyarakat;
2. Masih kurangnya kapasitas kelembagaan OPD yang kurang pro aktif dengan Satpol PP menyebabkan kurang efektifnya proses penertiban dan keamanan dalam mengamankan Perda maupun Perkada;
3. Pelanggaran Perda dan Perbup yang dilakukan oleh masyarakat, badan hukum dan instansi;
4. Adanya Kerawanan Gangguan keamanan di Lingkungan;
5. Belum optimalnya kualitas dan cakupan pelayanan pencegahan dan pemadaman kebakaran;
6. Perubahan gaya hidup masyarakat yang dapat mempengaruhi ketentraman ketertiban masyarakat;
7. Perkembangan teknologi informasi yang memicu adanya perpecahan / golongan;
8. Belum adanya kajian pemetaan resiko bencana yang merupakan dasar penanganan bencana di Kabupaten;
9. Kurangnya pelibatan masyarakat sebagai agen utama dalam penanggulangan bencana.

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

1. **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Satpol PP Kabupaten Rembang, perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan serta penetapan sasaran yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD/kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sebagai penjabaran dan implementasi atas visi dan misi Kepala daerah yang telah ditetapkan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, pada tahun 2016-2021 terdapat tujuan dan sasaran sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**

**Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2021**

**Periode 2021-2026**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET | | | |  | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 2. | Meningkatkan rasa aman masyarakat | Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat | Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 |
|  | % gangguan trantibum yang bisa diselesaikan | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 |
| %Perda dan perkda yang di tegakan | 80 | 80 | 85 | 85. | 90 | 90 |

**Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran adalah:**

1. Partisipasi;

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. partisipasi para pelaku pembangunan (*Stakeholders*) di dalam proses Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Semakin intensifnya peran pelaku pembangunan di dalam proses Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat maka pelayanan publik yang dihasilkan akan semakin menggambarkan kebutuhan riil masyarakat;

1. Sumber Daya Manusia;

SDM pengampu Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang baik harus memiliki pengetahuan yang cukup dan visi yang jelas, sehingga kualitas pelayanan publik yang dihasilkan bisa dijadikan acuan pembangunan secara umum.

1. Data;

Data kegiatan Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat harus berdasarkan data yang lengkap dan akurat, oleh karena itu peran data di dalam kegiatan Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat merupakan hal yang penting;

1. Dana;

Dana untuk kegiatan perencanaan memerlukan biaya untuk pelaksanaan proses Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat mulai dari penjaringan aspirasi dari seluruh pelaku pembangunan sampai pada perumusan kebijakan;

1. Sarana;

Sarana yang tersedia akan menunjang dalam peningkatan kualitas Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

1. **Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Satpol PP Kabupaten Rembang merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Rembang.

Perumusan strategi untuk pencapaian indikator sasaran “Terciptanya pelayanan publik yang tanggap dan prima”, adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Stategi, dan Kebijakan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Visi : REmbang Gemilang 2026 | | | |
| MISI 1 : Mengembangkan Profesionalisasi ,moderinisasi dan organisasi | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatkan rasa aman masyarakat | Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat | %Perda dan perkda yang di tegakan | Meningkatkan kualitas SDM |
|  |  | % gangguan trantibum yang bisa diselesaikan | Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan kota, penyelesaian konflik serta mitigas i bencana |

Dari tabel diatas dapat ditentukan strategi untuk pencapaian indikator sasaran ”Persentase Penegakan Perda”, sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 5.2**

**Penentuan Alternatif Strategi**

**Pencapaian Indikator Tujuan : Persentase Penegakan Perda**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faktor Eksternal  Faktor Internal | Peluang :   * + 1. Perda dan Perbup yang tegas dan merupakan dasar hokum penertiban     2. Adanya Perda dan Perbup menuju ketertiban umum dan ketentraman masyarakat     3. Dukungan instansi terkait seperti stakeholder, pemerintah daerah, TNI dan POLRI | Tantangan :   1. Pelanggaran Perda dan Perbup yang dilakukan oleh masyarakat , badan hokum dan instansi 2. Pola hidup masyarakat yang mengarah pada pelanggaran Perda dan Perbup 3. Pengaruh reformai dan globalisasi yang berdampak pada pelanggaran |
| Kekuatan :   1. Totalitas dan loyalitas anggota Satpol PP 2. Adanya KIS dengan berbagai pihakterkait 3. Adanya penawaran diklat dari berbagai Instansi | Alternatif Strategi:   1. Rapat koordinasi Perda dan Perbup 2. Meningkatkan operasi penertiban penegakan Perda 3. Menjaring relasi dengan stakeholder di lingkungan Kabupaten Rembang | Alternatif Strategi:   1. Sosialisasi Perda dan Perbup 2. Pembinaan terhadap masyarakat, badan hukum dan pelaku usah 3. Koordinasi penyelesaian pelanggaran Perda dan Perbup |
| Kelemahan :   1. Terbatasnya PPNS Satpol PP 2. Kurangnya Koordinasi antar instansi terkait 3. Personil belum mengikuti diklat dasar satpol PP sesuai Permendagri | Alternatif Strategi:   1. Memfasilitasi computer dengan jaringan internet 2. Menggandakan Perda dan Perbup 3. Mengirimkan personil Satpol PP untuk mengikuti diklat PPNS | Alternatif Strategi:   1. Pengadaan sarana dan rasarana Dinas 2. Menginventaris dan mensosialisasikan Perda dan Perbupkepada anggota 3. Mengawal pengiriman peserta diklat/bimtek |

Perumusan strategi untuk pencapaian indikator sasaran “Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk”, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3**

**Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran:**

**Rasio Jumlah Polisi pamong praja per 10.00 penduduk**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faktor Ekstrenal  Faktor Internal | Peluang:   1. Dukungan stakeholder terhadap Satlinmas 2. Kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan tentramdi lingkungan | Tantangan:   1. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap petugas Linmas 2. Belum adanya perhatian khusus dari masyarakat akan Satlinmas |
| Kekuatan :   1. Adanya PP Tahun 2010 dimana Linmas berada di SO Satpol PP 2. Semangat dan etos kerja yang tinggi petugas Linmas | Alternatif Strategi: Sosialisasi peran dan tugas organisasi Linmas | Alternatif Strategi: Mengadakan pembinaan Satlinmas di Kabupaten Rembang |
| Kelemahan :   1. Terbatasnya usia produktif Linmas 2. Belum adanya payung hukum yang mengatur Linmas secarak husus | Alternatif Strategi: Mendorong generas imuda melalui karang taruna untuk ikut serta dalam Linmas | Alternatif Strategi: Mengikut sertakan Linmas di berbagai even (HUT, Jambore, Penanggulangan Bencana dsb) |

**Tabel 5.4**

**Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran:**

**Cakupan Patroli petugas Satpol PP perhari**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faktor eksternal  Faktor Internal | Peluang:   1. Partisipasi dan kepekaan masyarakat terhadap gangguan tibumtrammas | Tantangan:   1. Rendahnya kepatuhan masyarakat terhadapPerda dan Perbup 2. Opini masyarakat yang tidak responsif terhadap patroli |
| Kekuatan :   1. Tersedianya sarana dan prasarana 2. Tercukupinya dana Operasional kegiatan | Alternatif Strategi: Meningkatkan intensitas patroli wilayah | Alternatif Strategi: Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Perda dan Perbup |
| Kelemahan :   1. Belum maksimalnya kinerja Satpol PP 2. Patroli yang belum sesuai jadwal | Alternatif Strategi:  Patroli sesuai jadwal dan peta kerawanan | Alternatif Strategi: Optimalisasi kinerja anggota SatpolPP |

Perumusan strategi untuk pencapaian indikator sasaran “Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan pencegahan dan pemadaman kebakaran”, adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.6**

**Penentuan Strategi**

**Pencapaian Indikator Sasaran: Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan pencegahan dan pemadaman kebakaran**

| **No.** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Kinerja**  **Sasaran** | **Strategi** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Meningkatkjan kualitas dan cakupan pelayanan pencegahan dan pemadaman kebakaran |  | Cakupan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran | Peningkatan kualitas SDM dan Sarana Prasaranaserta Peningkatan partisipasi aktif masyarakat |
| Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan pencegahan dan pemadaman kebakaran | Cakupan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran |

Dari tabel diatas dapat ditentukan strategi untuk pencapaian indikator sasaran ”Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan pencegahan dan pemadaman kebakaran”, sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 5.7**

**Penentuan Alternatif Strategi**

**PencapaianIndikatorSasaran:Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan pencegahan dan pemadaman kebakaran**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faktor Eksternal  Faktor Internal | Peluang:   1. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan pemadaman kebakaran | Tantangan:   1. Pola sebaran pemukiman yang tidakmemperhitung kan potensi kebakaran 2. Minimnya Hidran Air Umum dan Sumber Air di pelosok desa |
| Kekuatan :   1. Totalitas dan loyalitas anggota Satpol PP 2. Dukungan komitmen anggaran | Alternatif Strategi:   1. Sosialisasi kepada seluruh stakeholder 2. Bimtek pencegahan dan pemadaman kebakaran | Alternatif Strategi:   1. Sosialisasi Peraturan terkait mitigasi bahaya kebakaran di pemukiman 2. Pemetaan potensi sumber air dan hidran umum 3. Koordinasi dengan dinas terkait untuk penambahan hidran umum dan pemanfaatan sumber air atau air sungai |

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih,agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.Penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Satpol PP Kabupaten Rembang, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

1. **Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja**

Rencana program prioritas merupakan prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas. Program dan kegiatan Satpol PP untuk tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota**
   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahPeningkatan sarana dan prasarana aparatur
   2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. **Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
3. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
5. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
6. **Program Pencegahan Penanggulangan penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**
7. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
8. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
9. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
10. **Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Indikator kinerja program prioritas yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang memiliki manfaat untuk dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program, sehingga mencapai sasaran yang bermanfaat langsung oleh masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan program kerja dan kegiatan harus didukung oleh dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Rembang. Pendanaan indikatif dimaksudkan agar rencana kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai target yang diharapan. Besaran dana untuk menunjang kegiatan tergantung dari rincian biaya yang diperkirakan akan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk operasional yang ada di APBD berdasarkan Perda APBD Kabupaten Rembang tahun dimaksud.

Untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkesinambungan yang tertuang dalam visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016−2021, Satpol PP Kabupaten Rembang membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD Satpol PP Kabupaten Rembang. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada tabel berikut :

**Tabel 6.1**

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satpol PP Kabupaten Rembang

**Tahun 2022-2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | | **Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | | | | | | **Rencana Tahun 2022** | | | | | | | | | | | **Catatan Penting** | **Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023** | | |
| **Capaian Program** | | **Keluaran Sub Kegiatan** | | **Hasil Kegiatan** | | **Lokasi Output Kegiatan** | | | **Target Capaian Kinerja** | | | | | | **Pagu Indikatif (Rp.)** | **Sumber Dana** | **Target Capaian Kinerja** | | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)** |
| **Program** | | **Keluaran Sub Kegiatan** | | **Hasil Kegiatan** | | **Tolok Ukur** | **Target** |
| **1** |  |  |  |  | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **05** |  |  |  | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | | | | **8.975.820.000** |  | | | | **11,682,099,000** |
| **1** | **05** | **01** |  |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | | | | **7.840.355.250** |  | | | | **8,182,599,000** |
| **1** | **05** | **01** | **2.01** |  | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | **45,000,000** |  | | | | **90,000,000** |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  | | % Dokumen perencanaan perangkat daerah dengan kualtas baik | | Renja induk dan Renja perubahan (2 dokumen) | | | Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |  | | 75 % | |  | | 7.500.000 | '' |  |  |  | 30,000,000 |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |  | | % Dok anggran dengan kualitas baik | | RKA,DPA,RKA perubahan | | | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |  | | 75 % | |  | | 7.500.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 25,000,000 |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | | % dok evaluasi kinerja dengan kualitas baik | |  | | | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |  | | 75 % | |  | | 30,000,000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 35,000,000 |
| **1** | **05** | **01** | **5.00** |  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | **140.000.000** |  | | | | **6,834,867,000** |
| **1** | **05** | **01** | **5.00** | 02 | Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | |  | |  | |  | | |  | |  | | 81 ASNx3,5 jt | |  | 140.000.000 |  |  |  |  |  |
| **1** | **05** | **01** | **2.02** |  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | **6,952.820.000** |  | | | | **6,834,867,000** |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |  | | % ASN yang terlayani gaji dan tunjangan | |  | | | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |  | | 75 % | |  | 6,695.320.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 6,549,867,000 |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | |  | | % Penatausahaan keuangan yang dikelola dengan baik | | gender,rb | | | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |  | | 75 % | |  | 250.000.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 275,000,000 |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |  | | % rekomendasi hasil reviuw LKPD oleh inspektorat yang di tindaklanjuti | |  | | | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |  | | 75 % | |  | 7,500,000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 10,000,000 |
| **1** | **05** | **01** | **2.03** |  | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | **7.500.000** |  | | | | **20,000,000** |
| 1 | 05 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | |  | | % BMD yang di kelola dengn baik | |  | | | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |  | | 75 % | |  | 7.500.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 20,000,000 |
| **1** | **05** | **01** | **2.06** |  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | **55.835.250** |  | | | | **305,000,000** |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |  | | % Pemenuhan pelayanan penerangan bangunan kantor | |  | | | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |  | | 100 % | |  | 5,000,000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 25,000,000 |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |  | | % Pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | |  | | | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |  | | 100 % | |  | 5.000.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | laptop kantor rusak semua,printer kurang |  |  | 45,000,000 |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |  | | % pemenuhan penyediaan peralatan rumah tangga | |  | | | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |  | | 100 % | |  | 5,000,000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 25,000,000 |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |  | | % Pemenuhan penyediaan bahan logistik kantor | |  | | | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |  | | 75 % | |  | 10,000,000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 45,000,000 |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |  | | % pemenuhan penyediian barang cetak dan penggandaan | |  | | | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |  | | 100 % | |  | 4.675.250 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 40,000,000 |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | |  | | % pemenuhan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan | |  | | | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |  | | 75 % | |  | 2,160,000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 5,000,000 |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | |  | | % Pemenuhan penyediaan bahan/material | |  | | | Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |  | | 100 % | |  | 10,000,000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 45,000,000 |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |  | | % rekomendasi hasil rapat koordinasi yang ditindaklanjuti | |  | | | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |  | | 100 % | |  | 14,000,000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 75,000,000 |
| **1** | **05** | **01** | **2.08** |  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | **624,200,000** |  | | | | **762,732,000** |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | |  | | pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | |  | | | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |  | | 75 % | |  | 5,000,000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 4,000,000 |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |  | | pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | |  | | | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |  | | 75 % | |  | 67,200,000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 140,000,000 |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |  | | pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | |  | | | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |  | | 75 % | |  | 552,000,000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 618,732,000 |
| **1** | **05** | **01** | **2.09** |  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | **15.000,000** |  | | | | **170,000,000** |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |  | | % kendaraan dinas dengan kondisi baik | |  | | | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |  | | 75 % | |  | 10,000,000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 125,000,000 |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |  | | % peralatan/perlengkapan kantor dengan kondisi baik l | |  | | | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |  | | 75 % | |  | 5,000,000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 30,000,000 |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |  | | % gedung kantor dan bangunan lainya dengan kondisi baik | |  | | | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |  | | 75 % | |  | 0 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 15,000,000 |
| **1** | **05** | **02** |  |  | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | | | | **638.488.250** |  | | | | **1,823,000,000** |
| **1** | **05** | **02** | **2.01** |  | **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | | | | | | **390.000.000** |  | | | | **1,518,000,000** |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 01 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | |  | | Persentase Kelompok Sasaran Tibumtranmas yang terbina | |  | | | Kab. Rembang, Rembang, Pasar Banggi | |  | | 14 kelompok sasaran | |  | 12,000,000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | patroli malam,pagi,siang |  |  | 200,000,000 |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 02 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | |  | | Persentase Kelompok Sasaran Tibumtranmas yang terbina | |  | | | Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rembang, Rembang, Pasar Banggi | |  | | 14 kelompok | |  | 342.000,000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | honor di luar jam kerja (penuh dengan resiko) |  |  | 848,000,000 |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | |  | | Persentase Kelompok Sasaran Tibumtranmas yang terbina | |  | | | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |  | | 14 kelompok | |  | 12.000.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 120,000,000 |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 04 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | |  | | linmas yang di berdayakan | |  | | | Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |  | |  | |  | 12,000,000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 100,000,000 |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 05 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | |  | | jumlah tenaga teknis satpol pp yang di latih | |  | | | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |  | | jumlah orang ... | |  | 12,000,000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | sertakan data |  |  | 250,000,000 |
| **1** | **05** | **02** | **2.02** |  | **Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota** | | | | | | | | | | | | | | | | **36,488,250** |  | | | | **240,000,000** |
| 1 | 05 | 02 | 2.02 | 01 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | |  | | Jumlah pelanggaran perda/perkada yang tertangani | |  | | | Kab. Rembang, Rembang, Pasar Banggi | |  | |  | |  | 12,000,000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 60,000,000 |
| 1 | 05 | 02 | 2.02 | 02 | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | |  | | Jumlah pelanggaran perda/perkada yang tertangani | |  | | | Kab. Rembang, Rembang, Pasar Banggi | |  | | 5 pelanggaran | |  | 12.000.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 90,000,000 |
| 1 | 05 | 02 | 2.02 | 03 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | |  | | Jumlah pelanggaran perda/perkada yang tertangani | |  | | | Kab. Rembang, Rembang, Pasar Banggi | |  | | 5 pelanggaran | |  | 12,488,250 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 90,000,000 |
| **1** | **05** | **02** | **2.03** |  | **Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | | | | | | **12.000,000** |  | | | | **65,000,000** |
| 1 | 05 | 02 | 2.03 | 01 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | |  | | jumlah PPNS yang di berikan pembinaan | |  | | | Kab. Rembang, Rembang, Pasar Banggi | |  | | 5 PPNS | |  | 12.,000,000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 65,000,000 |
| **1** | **05** | **04** |  |  | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | | | | | | | | | | | | | | | | **496.976.500** |  | | | | **1,676,500,000** |
| **1** | **05** | **04** | **2.01** |  | **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | | | | | | **415.615.500** |  | | | | **1,401,500,000** |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | 02 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | |  | | Response time kejadian kebakaran | |  | | | Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |  | | 30 % | |  | 215.615.500 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | uang makan setelah kegiatan kebakran, (waktu-waktu tertentu),di kembalikan waktu normal sebelum di pangkas |  |  | 1,151,500,000 |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | 05 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | |  | | Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang memadai | |  | | | Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |  | | 50 % | |  | 200,000,000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 250,000,000 |
| **1** | **05** | **04** | **2.04** |  | **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran** | | | | | | | | | | | | | | | | **54.361.000** |  | | | | **275,000,000** |
| 1 | 05 | 04 | 2.04 | 01 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | |  | | Jumlah anggota masyarakat yang terlatih | |  | | | Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |  | | 50 orang | |  | 27.361.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 100,000,000 |
| 1 | 05 | 04 | 2.04 | 02 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | |  | | jumlah relawan yang dibentuk dan atau dibina | |  | | | Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |  | | 30 orang | |  | 27.000.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 100,000,000 |
| **1** | **05** | **04** | **2.02** |  | **Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran** | | | | | | | | | | | | | | | | **27,000,000** |  | | | |  |
| 1 | 05 | 04 | 2.02 | 01 | Pendataan sarana dan Prasarana Proteksi Kebakara | |  | | Proteksi lokasi sasaran yang dilakukan inspeksi | |  | | | Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |  | | 50 lokasi/sasaran | |  | 27,000,000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 75,000,000 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **8.975.820.000** |  | | | | **11,682,099,000** |

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indicator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulituntuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Satpol PPKabupaten Rembang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagaikomitmen untukmendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Satpol PP yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam dokumen RPJMD.

**Tabel 7.1.**

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator** | **Satuan** | **Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD** |  | **Target Capaian Setiap Tahun** | | |  |  | **Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | Indeks rasa aman | % | 80 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tabel 7.2**

**Indikator Kinerja Satpol PP Kabupaten Rembang**

**yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

**Tahun 2021-2026**

| **No** | **Indikator Kinerja** | **Satuan** | **Target Capaian Setiap Tahun** | |  |  |  |  |  | **Target Akhir RPJMD** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(5)* | *(6)* |  |  |  |  |  | *(7)=6* |
| 1 | Persentase Penanganan pelanggaran Perda | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 |
| 2 | Persentase Penegakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 80 | 85 |
| 3 | Persentase Kecamatan yang kondusif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | jumlah pelanggaran perda/perkada yang tertangani | Perda/  perkada | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| 5 | jumlah kelompok sasaran tibum yang terbina | Kelompok | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| 6 | Persentase kesiapsiagaan perlindungan Masyarakat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Rasio Linmas per Jumlah 10.000 penduduk | Rasio | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 8 | Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan berdampak kebakaran di kab. Rembang dalam tinggkat waktu tanggap | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | jumlah linmas terlatih | orang | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 |
| 10 | persentase kasus kebakaran yang tertangani sesuai SPM | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | nilai SAKIP | Angka | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 12 | Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum | angka | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 13 | Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur | angka | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 14 | Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian | angka | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 16 | Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan |  | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 17 | persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran |  | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 18 | persentase sarana dan prasarana aparatur (jumlah sarana prasarana aparatur) |  | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 19 | persentase pengelolaan manajemen kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu |  | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 20 | jumlah laporan keuangan yang disusun | Laporan | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 21 | Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah | % | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 22 | jumlah dokumen perencanaan yang tersusun | Dokumen | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 23 | jumlah dokumen evaluasi yang tersusun | Dokumen | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 24 | Persentase Informasi Yang Disampaikan Ke Publik | % | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 25 | jumlah informasi publik yang dikelola/disampaikan | Informasi | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

**Tabel 7.3**

**Penetapan Formulasi Indikator Kinerja**

**Satpol PP Kabupaten Rembang**

| **No** | **Indikator Kinerja** | **Formulasi** |
| --- | --- | --- |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* |
| 1 | Persentase Penanganan pelanggaran Perda | Jumlah penanganan pelanggaran perda / jumlah pelanggaran perda x 100% |
| 2 | Persentase kesiapsiagaan pelindungan Masyarakat | Jumlah kesiapsiagaan Linmas yang ada / Jumlah kegiatan Linmas x 100% |
| 3 | Persentase Penegakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah | (Jumlah pelanggar Prokumda yang ditangani/ Jumlah pelanggaran Prokumda yang ada ) x 100% |
| 4 | Persentase Kecamatan yang kondusif | (Jumlah Kecamatan yang kondusif / jumlah Kecamatan di Kab. Rembang x 100%) |

**BAB VIII**

**PENUTUP**

Rencana Strategis Tahun 2021-2026 adalah merupakan dokumen Strategis perencanaan pengendalian evaluasi program-program dan sasaran maupun prioritas yang akan di laksanakan setiap lima Tahun sekali.dengan mengedapankan permasalahan permasalhan yang berbasis masyarakat melalui pelaksanaan broblem solving dengan melibatkan masyarakat serta pelaku-pelaku yang terkait (*stakeholders*) guna menuju ***REMBANG GEMILANG*** dalam mendukung visi misi RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 serta berupaya untuk mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

Adapun upaya untuk mengetahui keberhasilan pencapaian target dalam pelaksanaan pelayanan perlu adanya pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pada setiap Tahun nya di tunjang dengan melihat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang dilakukan.

Rancangan Strategis Tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahapan setiap tahun nya dilakukan secara transparan, Responsif, Efisien dan efektif dimana dalam pelaksanaan evaluasi masyarkat berhak memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara,selanjutnya dapat melakukan antisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah juga pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal, dalam mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.

Rembang, 2021

KEPALA SATPOL PP KAB. REMBANG

Drs. WALUYO, MM

Pembina Utama Muda